

## IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA SINDANGSARI, KECAMATAN CIRANJANG, KABUPATEN CIANJUR

Sendy Dwi Astuti Jarkasi<sup>1</sup>, Sait Abdullah<sup>2</sup>, Abdul Rahman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka, Bandung, Indonesia

<sup>2,3</sup>Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia

Email: [sendydwiaj24@gmail.com](mailto:sendydwiaj24@gmail.com)

### Abstrak

Ketahanan pangan desa telah menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional dalam pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan program ketahanan pangan dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa di Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur dan mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi transendental untuk memahami pengalaman dan realitas implementasi kebijakan di tingkat desa. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Sindangsari secara administratif telah mengikuti ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa, namun secara substansi belum sepenuhnya memenuhi kriteria ideal implementasi kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa program relatif sesuai dengan karakteristik lingkungan agraris desa, tetapi masih terdapat kelemahan pada kapasitas pelaksana, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kejelasan proses pelaksanaan. Kendala utama implementasi berkaitan dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, belum tersedianya prosedur operasional yang terstandar, dan lemahnya sistem informasi yang mendukung penentuan sasaran program.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Ketahanan Pangan Desa, Dana Desa, Kapasitas Pelaksana

### Abstract

*Village food security has become a national policy priority in the use of Village Funds to improve rural welfare. This study analyzes the implementation of the food security program within the Village Fund budget in Sindangsari Village, Ciranjang District, Cianjur Regency, and identifies its constraints and responses. Using a qualitative approach with transcendental phenomenology, the study explores stakeholders' experiences and perceptions of policy implementation at the village level. Data was collected through in-depth interviews with key actors involved in the program. The findings show that the program has administratively complied with the priority provisions for Village Fund utilization. Substantively, however, its implementation has not fully met the ideal criteria of effective policy implementation. Although the program is broadly consistent with the village's agrarian context, weaknesses remain in implementers' capacity, beneficiary targeting, and procedural clarity. The main constraints include limited human resource quality, the absence of standardized operating procedures, and weak information systems for identifying program beneficiaries.*

**Keywords:** Policy Implementation; Village Food Security; Village Fund; Implementing Capacity.

## A. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup akses masyarakat terhadap pangan serta pemanfaatan pangan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan gizi. Di Indonesia, upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan pembangunan, salah satunya dengan menempatkan desa sebagai basis utama produksi pangan. Desa memiliki peran strategis dalam sistem pangan nasional karena sebagian besar kegiatan produksi pangan berakar pada potensi sumber daya lokal dan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan. Karena itu, penguatan pembangunan desa melalui Dana Desa diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, pengembangan usaha ekonomi produktif, penguatan BUM Desa, serta ketahanan pangan nabati dan hewani sebagai bagian dari pencapaian SDGs Desa (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022).

Kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan desa semakin diperkuat melalui pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta program ketahanan pangan dan hewani yang dilaksanakan sesuai kewenangan desa dan kebutuhan masyarakat setempat (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2023).

Cianjur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki basis ekonomi kuat pada sektor pertanian. Hal ini terlihat dari posisi Cianjur sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Barat serta kontribusi sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cianjur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, 2023). Namun demikian, dinamika ketahanan pangan daerah tetap perlu diperhatikan karena capaian ketahanan pangan wilayah berkaitan dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, sebagaimana tercermin dalam Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur tahun 2022 (Badan Pangan Nasional, 2022).

Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Desa Sindangsari di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Menariknya, berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi program ketahanan pangan desa di Kecamatan Ciranjang tahun 2024, Desa Sindangsari justru memperoleh skor rata-rata tertinggi dibandingkan desa lain dengan nilai 8,6. Desa ini memperoleh nilai tinggi pada indikator akses pangan, stabilitas pangan, kapasitas produksi, serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, capaian administratif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi riil masyarakat, sehingga menunjukkan adanya paradoks dalam implementasi kebijakan (Laporan Monev Kecamatan Ciranjang, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan di desa tersebut. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil implementasi di lapangan serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan

Teori implementasi kebijakan menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana program ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara efektif. Grindle (1980) menjelaskan, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan dan konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Dalam konteks Desa

Sindang Sari, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ketahanan pangan dirumuskan dan bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat mempengaruhi pelaksanaannya.

## 2. Model Implementasi Kebijakan “5 Tepat”

Model Implementasi Kebijakan “5 Tepat” merupakan kerangka analisis untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan publik melalui lima dimensi utama, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Tepat kebijakan berarti substansi kebijakan harus sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan dan dirumuskan oleh lembaga yang berwenang; tepat pelaksana menekankan kesesuaian aktor implementasi, baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun kolaborasi antarpihak; tepat target menguji apakah kelompok sasaran sesuai dengan rencana, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain, serta siap menerima intervensi; tepat lingkungan melihat dukungan lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal seperti opini publik, media, kelompok kepentingan, serta aktor strategis; sedangkan tepat proses menilai tahapan penerimaan, adopsi, dan kesiapan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah maupun masyarakat (Nugroho, 2014). Dengan demikian, model “5 Tepat” tidak hanya menilai apakah kebijakan telah dilaksanakan secara administratif, tetapi juga apakah kebijakan tersebut benar secara substansi, dijalankan oleh aktor yang sesuai, menasar penerima yang tepat, didukung oleh lingkungan yang kondusif, serta berlangsung melalui proses implementasi yang dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

## 3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan secara internasional dipahami sebagai kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi pangan untuk dapat hidup aktif dan sehat. Merujuk pada World Conference on Human Rights 1993 dan World Food Summit 1996 konsep ini sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu, baik dalam jumlah maupun mutu, agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai budaya setempat. Secara konseptual, ketahanan pangan juga dapat dilihat melalui dua pendekatan utama, yaitu ketersediaan pangan yang memadai dan akses individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1996).

## 4. Literature Review: Ketahanan Pangan Desa Berbasis Kapasitas Lokal

Studi-studi terdahulu tentang ketahanan pangan pedesaan memperlihatkan bahwa isu pangan tidak dapat dibaca semata sebagai persoalan ketersediaan produksi, tetapi sebagai relasi kompleks antara sumber daya alam, struktur sosial, kapasitas rumah tangga, dan dukungan kelembagaan. Kajian-kajian sebelumnya, tampak masih kuatnya kecenderungan untuk mengukur ketahanan pangan melalui indikator makro, indeks kerentanan, atau determinan kuantitatif rumah tangga, sementara proses implementasi program pada tingkat desa, belum banyak dijelaskan secara mendalam. Kerentanan pangan provinsi di Indonesia dipetakan melalui komponen exposure, sensitivity, dan adaptive capacity, tetapi pendekatan tersebut lebih kuat untuk membaca pola wilayah daripada menjelaskan proses sosial implementasi di satu desa tertentu (Juliannisa et al., 2025). Demikian pula, agenda ketahanan air-energi-pangan di pedesaan Indonesia masih menghadapi lemahnya koordinasi lintas sektor, pendekatan kebijakan yang cenderung sektoral, serta keterbatasan penjabaran implementatif pada tingkat lokal, padahal desa justru memiliki modal sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kepercayaan yang dapat menjadi dasar pemberdayaan (Nugroho et al., 2022).

Dalam lanskap kebijakan yang lebih luas, peneliti lain memperlihatkan, diskursus kebijakan ketahanan pangan Indonesia masih berfokus pada distribusi, infrastruktur, resiliensi,

dan keberlanjutan, namun kajian berbasis meta-sintesis belum menggantikan kebutuhan akan data lapangan primer yang mampu menangkap variasi implementasi lokal (Prasetyo et al., 2025). Maka, penelitian ini mengambil posisi penting untuk menjembatani celah tersebut: bukan sekadar menilai ada atau tidaknya ketahanan pangan, melainkan membangun pemahaman kualitatif tentang bagaimana program dijalankan, siapa aktor yang berperan, sumber daya apa yang dimobilisasi, hambatan apa yang muncul, serta bagaimana praktik lokal dapat membentuk model implementasi yang lebih kontekstual; posisi ini sejalan dengan Mockshell & Ritter (2024) yang menunjukkan bahwa analisis program pangan berbasis organisasi komunitas perlu membaca dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas, agency, dan keberlanjutan secara bersamaan agar dampak program tidak dipahami secara sempit.

### C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Desain penelitian merupakan keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, mulai dari penentuan masalah, pemilihan pendekatan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian (Nazir, 2003). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai proses implementasi program, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan (Sugiyono, 2010). Wawancara dengan sejumlah informan kunci yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), perwakilan kelompok tani, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah kecamatan, serta Pendamping Lokal Desa (PLD). Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip, laporan program, laporan keuangan desa, notulen, agenda kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian, dokumentasi dipahami sebagai teknik pengumpulan data dengan menelusuri berbagai catatan atau dokumen yang berkaitan dengan variabel atau fokus penelitian (Arikunto, 2017). Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara yang dirancang untuk menggali informasi implementasi Program Ketahanan Pangan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan di Desa Sindangsari. Analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan rumusan masalah penelitian yang meliputi pelaksanaan program dan kendala implementasi. Secara administratif, implementasi program ketahanan pangan di Desa Sindangsari memperoleh penilaian yang cukup baik. Berdasarkan evaluasi tingkat kecamatan, Desa Sindangsari tercatat sebagai desa terbaik pertama di Kecamatan Ciranjang dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2024 dengan skor rata-rata 8,6. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek kepatuhan administrasi, realisasi anggaran, serta pelaporan program yang dinilai memenuhi ketentuan regulasi penggunaan Dana Desa. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya paradoks antara capaian administratif dengan kondisi riil di lapangan. Data dokumentasi menunjukkan bahwa meskipun program berjalan dan anggaran terserap dengan baik, angka stunting di desa tersebut justru meningkat dari 11 kasus pada tahun 2023 menjadi 27 kasus pada tahun 2024. Selain itu, harga beras lokal di tingkat desa juga mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai

Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif belum tentu sejalan dengan pencapaian tujuan substantif program ketahanan pangan.

Secara prosedural, implementasi program mengikuti mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang menjadi forum utama dalam proses perencanaan program. Pemerintah desa menyusun kegiatan yang kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Kepala Desa Sindangsari menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada regulasi pusat terkait prioritas penggunaan Dana Desa. Ia menyatakan, “Dasar pelaksanaannya mengacu pada Permendes mengenai prioritas penggunaan dana desa, dimana minimal 20% harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kami di desa menindaklanjutinya dengan memasukkannya ke dalam RKPDDes dan APBDDes melalui musyawarah desa” (Wawancara, Kepala Desa Sindangsari, 08 Agustus 2025). Namun demikian, penelitian menemukan bahwa kebijakan yang diimplementasikan di tingkat desa masih belum sepenuhnya memiliki target capaian yang jelas. Kepala Desa Sindangsari mengakui bahwa program masih berada pada tahap pengembangan sehingga belum memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Ia menyampaikan, “Belum (ada target capaian) karena masih dalam tahapan pengembangan dan belum maksimal serta anggaran yang terbatas.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan strategis dalam implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan.

Implementasi kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan dukungan perangkat desa serta pendampingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Namun, penelitian menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia pelaksana masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Sekretaris Desa Sindangsari mengakui bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Ia menyatakan, “Keterbatasan SDM yang kompeten sangat berpengaruh secara signifikan. Mengingat SDM adalah faktor kunci dalam menggerakkan seluruh program desa, kendala dalam aspek kualitas personil seringkali menghambat akselerasi dan inovasi dalam mencapai target ketahanan pangan yang lebih progresif” (Wawancara, Sekretaris Desa Sindangsari, 07 Agustus 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor kapasitas pelaksana menjadi determinan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peran tenaga teknis seperti Penyuluh Pertanian Lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan program. Salah satu informan dari PPL menyatakan bahwa keterlibatan mereka seringkali terbatas pada tahap pelaksanaan teknis. Ia menjelaskan, “Kendala utamanya adalah keterbatasan peran kami yang hanya dilibatkan pada tahap bimbingan teknis untuk petani tanpa disertakan dalam tahap perencanaan strategis” (Wawancara, Penyuluh Pertanian, 08 Agustus 2025). Kondisi ini menyebabkan potensi keahlian teknis yang dimiliki tenaga penyuluh belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain aspek pelaksana, penelitian juga menemukan permasalahan dalam penentuan sasaran penerima manfaat program. Secara ideal, penerima bantuan seharusnya diprioritaskan kepada masyarakat yang paling membutuhkan atau memiliki kerentanan pangan yang tinggi. Namun dalam praktiknya, proses penentuan sasaran seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan tekanan dari masyarakat. Ketua BPD Desa Sindangsari menjelaskan bahwa dalam praktiknya proses penentuan penerima bantuan seringkali mempertimbangkan prinsip pemerataan. Ia menyatakan, “Idealnya yang paling membutuhkan. Tapi di lapangan susah, banyak tekanan. Akhirnya kadang dibagi rata biar adil, atau digilir. Jadi yang belum dapat tahun lalu, dapat tahun ini” (Wawancara, Ketua BPD, 09 Agustus 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya dilema antara prinsip keadilan sosial dengan prinsip ketepatan sasaran program. Kondisi tersebut juga dikonfirmasi oleh perwakilan kelompok tani yang menyampaikan bahwa bantuan program terkadang tidak sepenuhnya diterima oleh petani yang

benar-benar membutuhkan. Ia mengungkapkan, “Kadang kurang pas. Ada yang bukan petani tulen malah dapat bantuan bibit banyak, sementara yang benar-benar butuh malah nggak kebagian atau dapat sedikit” (Wawancara, Kelompok Tani, 09 Agustus 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa validitas data penerima manfaat masih menjadi persoalan penting dalam implementasi program. Temuan ini menunjukkan bahwa program ketahanan pangan di desa masih lebih berfokus pada penyediaan input produksi seperti benih dan pupuk dibandingkan dengan upaya mitigasi risiko produksi pertanian. Padahal faktor lingkungan dan risiko produksi memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sektor pertanian di tingkat lokal.

Dari sisi proses implementasi, penelitian menemukan bahwa mekanisme pelaksanaan program masih belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan menjelaskan bahwa pelaksanaan program seringkali mengikuti kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menyatakan, “Belum ada SOP tertulis yang detail. Kita mengalir saja sesuai kebiasaan dan arahan lisan dari pendamping atau kecamatan. Jadi kadang beda orang beda cara kerjanya.” (Wawancara, Ketua Tim Pelaksana, 10 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aspek metodologi pelaksanaan program masih belum terstandarisasi. Selain itu, aspek pengawasan program juga masih relatif lemah. Berdasarkan hasil survei, sebagian responden merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan penggunaan Dana Desa. Pendamping Lokal Desa (PLD) menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan standarisasi prosedur implementasi program. Ia menyampaikan: “Kami telah menyarankan adanya penguatan fungsi pengawasan yang lebih preventif serta penyusunan Standar Operasional Prosedur di tingkat desa yang lebih rigid terkait sanksi dan monitoring” (Wawancara dengan PLD, 10 Agustus 2025).

Pertama, tepat kebijakan dan informasi (*right policy and information*). Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, ketepatan kebijakan (*right policy*) berkaitan dengan sejauh mana substansi kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nugroho menyatakan bahwa kebijakan yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang tepat terhadap masalah publik serta didukung oleh informasi yang akurat mengenai kondisi lapangan (Nugroho, 2014). Dalam konteks Program Ketahanan Pangan di Desa Sindangsari, secara normatif kebijakan yang diimplementasikan telah sesuai dengan regulasi nasional mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang mengharuskan alokasi minimal 20% untuk program ketahanan pangan. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan, meskipun kebijakan tersebut relevan dengan karakteristik Desa Sindangsari yang agraris, implementasinya belum sepenuhnya berbasis pada informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan riil masyarakat. Kelemahan pada aspek informasi terlihat dari belum tersedianya basis data mikro mengenai kerentanan pangan, profil petani kecil, serta rumah tangga yang berisiko mengalami masalah gizi. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam kerangka tersebut, ketersediaan informasi yang akurat menjadi faktor penting karena membantu pelaksana memahami tujuan program, menentukan kelompok sasaran, serta menyesuaikan strategi implementasi dengan kondisi sosial dan kelembagaan masyarakat (Grindle, 1980).

Akibat lemahnya basis informasi tersebut, kebijakan yang diterapkan di tingkat desa cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan spesifik seperti peningkatan angka stunting dan kenaikan harga pangan lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional dengan realitas implementasi di tingkat lokal. Karenanya, penguatan sistem informasi desa menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan yang diimplementasikan benar-benar berbasis pada data empiris mengenai kondisi masyarakat.

Kedua, dimensi tepat pelaksana dalam model implementasi “5 Tepat” Nugroho menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kesesuaian aktor pelaksana dengan karakter dan kebutuhan program, bukan sekadar oleh keberadaan mandat formal (Nugroho,

2014). Dalam konteks Program Ketahanan Pangan di Desa Sindangsari, TPK memang telah tepat secara administratif karena dibentuk oleh pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan, tetapi belum sepenuhnya tepat secara substantif karena kapasitas teknis dan manajerialnya masih terbatas, khususnya dalam bidang pertanian dan pengelolaan program. Hal ini sejalan dengan Grindle yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh konteks pelaksanaan, termasuk kapasitas sumber daya dan komitmen aktor pelaksana (Grindle, 1980). Keterbatasan tersebut menyebabkan program lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi, seperti pengadaan barang, sementara pendampingan teknis kepada petani belum optimal. Karena itu, dimensi tepat pelaksana perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas TPK, pelibatan penyuluh pertanian, serta koordinasi dengan kelompok tani agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program menimbulkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Padahal, dalam praktiknya PPL belum selalu dilibatkan secara optimal sejak tahap perencanaan program, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi aktor pelaksana dan kompleksitas program ketahanan pangan yang dijalankan. Kajian terbaru menunjukkan, layanan penyuluhan pertanian berperan penting sebagai penghubung antara pengetahuan teknis, kebijakan, dan praktik di tingkat petani, terutama melalui diseminasi informasi, pelatihan, serta pendampingan inovasi pertanian (Yanfika et al., 2024). Selain itu, efektivitas penyuluhan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan petani, dukungan kelembagaan lokal, penguatan sumber daya keluarga, dan kemampuan pengelolaan usaha tani (Salam et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan studi yang menegaskan bahwa layanan penyuluhan dan modal manusia berpengaruh positif terhadap ketahanan dan keberlanjutan usaha tani, sehingga penguatan kapasitas lokal perlu menjadi bagian dari desain implementasi program pangan desa (Azhari et al., 2025).

Ketiga, tepat sasaran (*right target*) merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauhmana program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan (R. Nugroho, 2014). Dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Sindangsari, masih ditemukan persoalan dalam penentuan penerima manfaat, terutama ketika bantuan diberikan atas dasar pemerataan sosial atau rotasi penerima, bukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kerentanan pangan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penargetan belum sepenuhnya berbasis data yang valid dan mutakhir. Studi menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan pangan sangat dipengaruhi oleh ketepatan basis data penerima, sebab data yang tidak diperbarui berpotensi menimbulkan *inclusion error* dan *exclusion error* (Dewi et al., 2022). Selain itu, reformasi perlindungan sosial berbasis voucher pangan di Indonesia menunjukkan bahwa perbaikan desain penargetan dapat meningkatkan kinerja program dan keberagaman konsumsi rumah tangga miskin (Rammohan & Tohari, 2024). Karena itu, penguatan sistem data petani dan pemetaan kerentanan pangan menjadi prasyarat penting agar program ketahanan pangan desa lebih tepat sasaran.

Keempat, tepat lingkungan (*right environment*) berkaitan dengan kesesuaian program dengan kondisi sosial, ekonomi, geografis, serta sistem pasar yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Nugroho, 2014). Desa Sindangsari memiliki potensi lingkungan yang relatif mendukung bagi pengembangan pertanian, terutama karena ketersediaan lahan subur dan sumber air yang dapat menjadi modal produksi pangan desa. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam kerangka program ketahanan pangan karena program belum terintegrasi secara kuat dengan sistem ekonomi lokal, khususnya pemasaran hasil pertanian. Kondisi ini terlihat dari ketergantungan petani pada tengkulak, yang menyebabkan posisi tawar petani lemah dan harga hasil panen tidak stabil. Studi Wangu menegaskan, ketahanan pangan petani kecil tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan produksi, tetapi perlu dipahami melalui pendekatan sistem pangan yang menghubungkan produksi, akses pasar, pendapatan, dan kebutuhan rumah tangga (Wangu, 2021) Dalam konteks Indonesia, studi lain

juga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan kelompok tani dan aksi kolektif berpengaruh penting terhadap peningkatan akses pasar petani kecil (Permadi & Winarti, 2025). Dengan demikian, penguatan kelembagaan tani, kemitraan pemasaran, dan integrasi rantai nilai lokal menjadi strategi penting agar potensi lingkungan Desa Sindangsari dapat mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Kelima, tepat proses, metode, dan uang (*right process, method, and money*) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran, tetapi juga oleh kejelasan prosedur, ketepatan metode pelaksanaan, kualitas pengawasan, serta kesesuaian pembiayaan dengan tujuan substantif program (Nugroho, 2014). Dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Sindangsari, kelemahan utama terlihat pada belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci untuk mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan hasil program. Akibatnya, pelaksanaan program cenderung mengikuti pola yang sama dari tahun ke tahun dan bergantung pada tafsir masing-masing pelaksana, bukan pada standar teknis yang terukur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifin & Sukmana, yang menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan desa dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, termasuk keberadaan SOP sebagai instrumen penting agar pelaksanaan program berjalan konsisten (Arifin & Sukmana, 2024). Dari aspek keuangan, penggunaan Dana Desa di Sindangsari masih lebih dominan diarahkan pada pengadaan input fisik, seperti benih, bibit, atau ternak, sementara alokasi untuk pelatihan, pendampingan teknis, inovasi pascapanen, pemasaran, serta monitoring masih terbatas. Padahal, studi menegaskan bahwa strategi anggaran ketahanan pangan perlu diarahkan secara lebih seimbang, tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga untuk memperkuat teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan sistem pangan jangka Panjang (Akbar et al., 2024).

Jika dianalisis dengan kerangka “5 Tepat”, implementasi program di Desa Sindangsari masih menunjukkan kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional dan praktik di tingkat desa. Pada aspek tepat sasaran, lemahnya basis data petani dan kerentanan pangan menyebabkan penerima manfaat belum sepenuhnya ditentukan berdasarkan kebutuhan riil. Pada aspek tepat pelaksana, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia membuat program belum mampu bergerak dari sekadar distribusi bantuan menuju penguatan kemandirian pangan. Penelitian lain menemukan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan berkaitan dengan penyediaan input pertanian, distribusi dan pemasaran pangan, inovasi, serta pemanfaatan hasil produksi (Andriani et al., 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa program pangan desa seharusnya tidak berhenti pada pengadaan barang, tetapi perlu mencakup keseluruhan rantai nilai pangan. Selain itu, penelitian lain menekankan, efektivitas Dana Desa membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, pedoman alokasi yang jelas, pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan proyek, serta sistem monitoring dan evaluasi yang kuat (Adam et al., 2024). Dengan demikian, model implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Sindangsari masih cenderung administratif dan *top-down*, karena lebih berorientasi pada kepatuhan regulatif penggunaan Dana Desa daripada pencapaian dampak substantif terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan penurunan stunting. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi menuju model implementasi yang lebih partisipatif, berbasis data, memiliki SOP yang jelas, didukung anggaran nonfisik yang memadai, serta terintegrasi dengan sistem ekonomi desa agar ketahanan pangan dapat dicapai secara berkelanjutan.

**E. KESIMPULAN**

Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, secara normatif telah sesuai dengan kebijakan nasional terkait prioritas penggunaan Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Namun, berdasarkan analisis model implementasi kebijakan “5 Tepat”, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan substantif peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Kelemahan utama terlihat pada aspek ketersediaan informasi yang akurat mengenai kondisi kerentanan pangan masyarakat. Keterbatasan data mikro mengenai profil petani kecil, rumah tangga rentan pangan, serta kelompok masyarakat berisiko stunting menyebabkan kebijakan yang diimplementasikan di tingkat desa cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana melalui pelatihan teknis, penyusunan regulasi dan SOP pelaksanaan program, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemasaran hasil pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, L., Sambodo, M. T., Purwanto, P., Purnagunawan, R. M., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Soekarni, M., Adityawati, S., Thoha, M., & Suryanto, J. (2024). Village Fund and Indonesia Rural Development: Rethinking Institutional Capacity and Governance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24294/jipd9875>
- Akbar, A., Darma, R., Irawan, A., Mahyuddin, Feryanto, & Akzar, R. (2024). COVID-19 Pandemic and Food Security: Strategic Agricultural Budget Allocation in Indonesia. *Journal of Agriculture and Food Research*, 18, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101494>
- Andriani, I., Fitri, Y., & Wahyuni, I. (2024). Relationship Between the Implementation of Village Fund Programmes for Food Security and Community Perceptions of the Achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 27(1), 22–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jiseb.v27i01.33618>
- Arifin, M. Z., & Sukmana, H. (2024). Overcoming Infrastructure Challenges to Unlock Food Security in Rural Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1413>
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhari, R., Amanah, S., Fatchiya, A., & Kinseng, R. A. (2025). The Influence of Agricultural Extension Services and Livelihood Capitals on Farmers’ Climate Resilience in West Java, Indonesia: A Structural Equation Modeling Approach. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)*, 15(5), 904–922. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jpsl.15.5.904>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Cianjur*. Cianjur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.
- Dewi, M. M., Sukamdi, S., & Pangaribowo, E. H. (2022). The Effectiveness of Targeting Food Assistance Program in Indonesia. *Southeast Asian Journal of Economics*, 10(1), 37–72.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1996). *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*. Food and Agriculture Organization.
- Grindle, M. S. (1980). *Policy Content and Context in Implementation*. Princeton University Press.

- Juliannisa, I. A., Rahma, H., Mulatsih, S., & Fauzi, A. (2025). Regional Vulnerability to Food Insecurity: The Case of Indonesia. *Sustainability*, 17(11), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17114800>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mockshell, J., & Ritter, T. N. (2024). Applying the Six-dimensional Food Security Framework to Examine a Fresh Fruit and Vegetable Program Implemented by Self-help Groups During the COVID-19 Lockdown in India. *World Development*, 175, 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106486>
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrawati, D. R., Wahyuningrum, N., Adi, R. N., Supangat, A. B., Indrajaya, Y., Putra, P. B., Cahyono, S. A., Nugroho, A. W., Basuki, T. M., Savitri, E., Yuwati, T. W., Narendra, B. H., Sallata, M. K., Allo, M. K., Bisjoe, A. R., Muin, N., Isnain, W., Ansari, F., ... Hani, A. (2022). Toward Water, Energy, and Food Security in Rural Indonesia: A Review. *Water*, 14(10), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/w14101645>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Bandung: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Permadi, R., & Winarti, L. (2025). Enhancing Market Access for Smallholder Farmers in Indonesia: The Role of Managerial Capacity and Member Motivation in Collective Action within Farmer Groups. *AGRIS On-Line Papers in Economics and Informatics*, 17(4), 101–115. <https://doi.org/10.7160/aol.2025.170408>
- Prasetyo, A. S., Dooley, K. E., Widyastuti, K., & Firdausi, A. (2025). Comparing National Food Security Policies in Indonesia and Thailand: A Systematic Meta-Synthesis Approach. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1676641>
- Rammohan, A., & Tohari, A. (2024). Food Vouchers and Dietary Diversity: Evidence from Social Protection Reform in Indonesia. *Food Security*, 16(1), 161–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12571-023-01413-0>
- Salam, M., Jamil, M. H., Tenriawaru, A. N., Kamarulzaman, N. H., Syam, S. H., Rahmadanih, Ramadhani, A., Bidanghan, A. M., Muslim, A. I., Ali, H. N. B., & Ridwan, M. (2024). The Effectiveness of Agricultural Extension in Rice Farming in Bantaeng Regency, Indonesia: Employing Structural Equation Modeling in Search for the Effective Ways in Educating Farmers. *Journal of Agriculture and Food Research*, 18, 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101487>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tono, Andayani, D. W., Hidayat, A., Maheswari, L. D., & Ulfa, N. A. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan*. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Wangu, J. (2021). The Need for a Food Systems Approach in Smallholder Food and Nutrition Security Initiatives: Lessons from Inclusive Agribusiness in Smallholder Communities. *Foods*, 10(8), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/foods10081785>
- Yanfika, H., Effendi, I., Sumaryo, & Ansari, A. (2024). The Role of Agricultural Extension Services on Supporting Circular Bioeconomy in Indonesia. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1428069>